

Analisis Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Mamasa

Sumarni¹, Baharuddin², Sita Y Sabandar³

Universitas Gunadarma, Indonesia^{1,2,3}

Email: annie.akib@gmail.com¹, baharuddin@gmail.com², sitasabandar@gmail.com³

Kata kunci:

DAU, DAK, DBH, PAD, Belanja Daerah.

Abstrak

Pesatnya perkembangan daerah dengan berkembangnya kegiatan perpajakan/fiskal yang memerlukan alokasi dana dari pemerintah daerah merupakan pengeluaran yang wajar dan pembangunan yang membutuhkan ketersediaan dana dalam jumlah yang besar untuk mendanai kegiatan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Dana Perimbangan yaitu DAU, DAK, DBH terhadap Belanja Daerah dan untuk menganalisis Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah sedangkan Pendapatan Asli Daerah adalah sumber pendapatan daerah. Metode penelitian ini adalah kuantitatif deskriptif di mana data dikumpulkan melalui data. Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah data Laporan Realisasi DAU, DAK, DBH, PAD, dan Belanja Daerah tahun 2019-2023 yang diambil per bulan sebanyak 60 data. Data kemudian akan dianalisis dengan metode regresi berganda yang sudah memenuhi uji asumsi klasik. Hasil dari penelitian ini adalah DAU dan DAK tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Daerah Kabupaten Mamasa, sedangkan DBH dan PAD berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Daerah Kabupaten Mamasa.

Keywords:

DAU, DAK, DBH, PAD, Shopping Area

Abstract

The rapid development of the region with the development of tax/fiscal activities that require the allocation of funds from local governments is a reasonable expenditure and development that requires the availability of large amounts of funds to fund these activities. This research to analyze Balancing Funds, namely DAU, DAK, DBH against Regional Expenditures and to analyze Regional Original Income against Regional Expenditures. Balancing Funds are funds sourced from APBN revenues allocated to the Regions, while Original Regional Income is a source of regional income. This research method is descriptive quantitative where data is collected through data. The sample used in this research is 60 data from the 2019-2023 DAU, DAK, DBH, PAD and Regional Expenditure Realization Reports, which are taken per month. The data will then be analyzed using the multiple regression method which meets the classical assumption test. The results of this research are that DAU and DAK do not have a significant effect on Mamasa Regency Regional Expenditures, while DBH and PAD have a significant effect on Mamasa Regency Regional Expenditures.

*Correspondence Author: Sumarni

Email: annie.akib@gmail.com



PENDAHULUAN

Otonomi daerah menekankan pada peran dan kemampuan pemerintah daerah dalam pembangunan dan juga bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan keuangan daerah (Hendriko, 2021). Pesatnya perkembangan daerah dengan berkembangnya kegiatan perpajakan/fiskal yang memerlukan alokasi dana dari pemerintah daerah merupakan pengeluaran yang wajar dan pembangunan yang membutuhkan ketersediaan dana dalam jumlah yang besar untuk mendanai kegiatan tersebut. Belanja Pemerintah Daerah (Belanja) yang dilaporkan oleh pemerintah daerah dalam APBD merupakan kegiatan rutin pengeluaran kas daerah untuk mendanai kegiatan operasional di lingkungan pemerintahan. Dengan meningkatnya pengeluaran, sumber daya yang signifikan diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pemerintah daerah. Belanja daerah merupakan alokasi yang harus dilakukan secara efektif dan efisien. Belanja daerah merupakan tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah. Apalagi dengan adanya otonomi daerah, pemerintah memiliki kewajiban untuk mengelola keuangan daerah dengan baik dan efektif. Berlakunya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah telah membawa perubahan mendasar dalam sistem dan mekanisme penyelenggaraan pengelolaan pemerintahan kota. Undang-undang ini mengatur agar pemerintah pusat mentransfer dana perimbangan kepada pemerintah daerah untuk menjalankan kewenangannya.

Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus. Kebutuhan akan peningkatan belanja, pemerintah negara bagian atau kabupaten/kota tidak bisa hanya mengandalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Monica & Sa'roni, 2022). Pada akhirnya, dana transfer tersebut adalah Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH), yang digunakan untuk menutupi kebutuhan belanja daerah. Bentuk perimbangan keuangan adalah adanya dana perimbangan yang dimulai dari pusat.

Dana perimbangan diberikan oleh kepala daerah untuk mendanai kebutuhan daerah guna tercapainya perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah serta antar pemerintah daerah sebagai bagian dari pelaksanaan desentralisasi yang dananya berasal dari pendapatan APBN yang diberikan. Pemerintah daerah dapat memanfaatkan potensi daerah melalui pendapatan asli daerah yang digunakan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah, di samping sumber keuangan dari Dana Perimbangan. Penerimaan daerah awal dianggap sebagai alternatif sumber pendanaan daerah yang digunakan daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan dan belanja pembangunan untuk meminimalkan ketergantungan daerah terhadap subsidi pemerintah pusat. Transfer dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah merupakan sumber pendanaan untuk pelaksanaan kewenangannya. Namun pada kenyataannya, transfer dana tersebut merupakan sumber utama pendanaan belanja daerah di pemerintah daerah. Kekurangan transfer dana tersebut ditutupi oleh sumber pendanaan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah adalah Pendapatan Daerah dari Bidang Pajak Daerah, Pajak Daerah, Hasil Usaha Daerah, Hasil Pengelolaan Barang Milik Daerah Orang Pribadi, dan Pendapatan Asli Daerah lainnya yang sah. Hal ini tidak terlepas dari kinerja keuangan yang mencakup stabilisasi dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah (Sulistyo, 2018). Kinerja keuangan merupakan salah satu contoh keberhasilan suatu perusahaan, yang dapat diartikan sebagai hasil dari berbagai kegiatan yang telah dilakukan (Lambe & Tandi, 2021); (Winarni et al., 2020).

Masalah yang dihadapi pemerintah daerah di lembaga publik adalah masalah alokasi anggaran. Alokasi anggaran adalah total alokasi dana untuk setiap program. Dengan sumber daya yang terbatas, pemerintah daerah harus dapat menggunakan pendapatan yang dihasilkan untuk

belanja daerah yang produktif, dan selanjutnya agar tidak terjadi pemborosan anggaran, misalnya untuk melakukan kegiatan pembangunan.

Berdasarkan data dari BKAD Kabupaten Mamasa data Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Daerah Kabupaten Mamasa Tahun 2019-2023 sebagai berikut:

Tabel 1. Realisasi Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Daerah Kabupaten Mamasa 2019-2023

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Belanja Daerah
2019	31.929.447.978,00	800.678.128.062,00
2020	31.144.643.233,24	947.856.632.455,53
2021	16.643.739.465,36	925.410.149.297,76
2022	19.305.880.880,30	952.869.141.656,94
2023	19.760.595.841,00	867.074.126.825,00

Sumber Data : Data diolah, 2024

Berdasarkan data dari BKAD Kabupaten Mamasa Data Dana Perimbangan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamasa Tahun 2019-2023. Berikut data Realisasi Dana Perimbangan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamasa.

Tabel 2. Realisasi Dana Perimbangan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamasa 2019-2023

Tahun	DBH	DAU	DAK	Belanja Daerah
2019	6.760.048.793	538.535.197.000	208.169.616.618	800.678.128.062,00
2020	6.712.379.032	494.356.232.000	182.801.659.479	947.856.632.455,53
2021	11.690.067.719	489.195.519.000	165.529.694.207	925.410.149.297,76
2022	10.190.873.598	489.695.520.000	143.623.000.420	952.869.141.656,94
2023	5.972.007.000	507.205.190.800	218.416.121.050	867.074.126.825,00

Sumber Data : Data diolah 2024

Pada tabel 1 perbandingan antara PAD mengalami kenaikan atau penurunan yang menunjukkan bahwa belanja daerah belum cukup stabil dalam pendapatan asli daerah dan belanja daerah. Pada tabel 2 menunjukkan bahwa Dana Perimbangan meningkat dan kemudian semakin menurun setiap tahunnya, terutama untuk Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Alokasi Umum (DAU) terus menurun. Terdapat perbedaan kinerja keuangan yang tidak merata dalam hal pelaksanaan program dan kegiatan di Kabupaten Mamasa. Hal ini menciptakan ketidakseimbangan keuangan antara satu daerah dengan daerah lainnya.

Pemerintah mengalokasikan dana dari APBN untuk memenuhi kebutuhan daerah dalam desentralisasi untuk menguraingi disparitas antar kabupaten/kota (Wasistiono & Polyando, 2017). Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus inilah yang mentransfer dana dari pusat ke daerah.

Pemerintah ingin menekankan isu ketidakberpihakan dalam pengelolaan kegiatan pemerintahan. Ini akan memungkinkan dana perimbangan yang disediakan oleh pemerintah pusat untuk menutupi pengeluaran Kabupaten Mamasa. Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan

perundangundangan untuk mengumpulkan dana guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatannya yang bersumber dari potensi daerah itu sendiri (Yuliantoni & Arza, 2021); (Aji et al., 2018). Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang digunakan untuk modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat. Kewenangan pemerintah daerah dalam pelaksanaan kebijakannya sebagai daerah otonom sangat dipengaruhi oleh kemampuan daerah tersebut dalam menghasilkan pendapatan daerah.

Semakin besar Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diterima, maka akan semakin besar pula kewenangan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan kebijakannya (Monica & Sa'roni, 2022); (Rokhman, 2023). Upaya meningkatkan kemampuan penerimaan daerah, khususnya penerimaan dari PAD harus diarahkan pada usaha yang terus-menerus berlanjut agar PAD tersebut terus meningkat. Jika PAD meningkat, maka dana yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah akan lebih tinggi dan tingkat kemandirian daerah akan meningkat pula, sehingga Pemerintah Daerah akan berinisiatif untuk lebih menggali potensi-potensi daerah dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Nurdiwaty et al., 2017). Hal ini menunjukkan suatu indikasi yang kuat, bahwa jika PAD suatu daerah meningkat, maka kemampuan daerah untuk melakukan pengeluaran belanja modal juga akan mengalami suatu peningkatan. Sehingga pada akhirnya diharapkan akan dapat memperkecil ketergantungan terhadap sumber penerimaan dari pemerintah pusat.

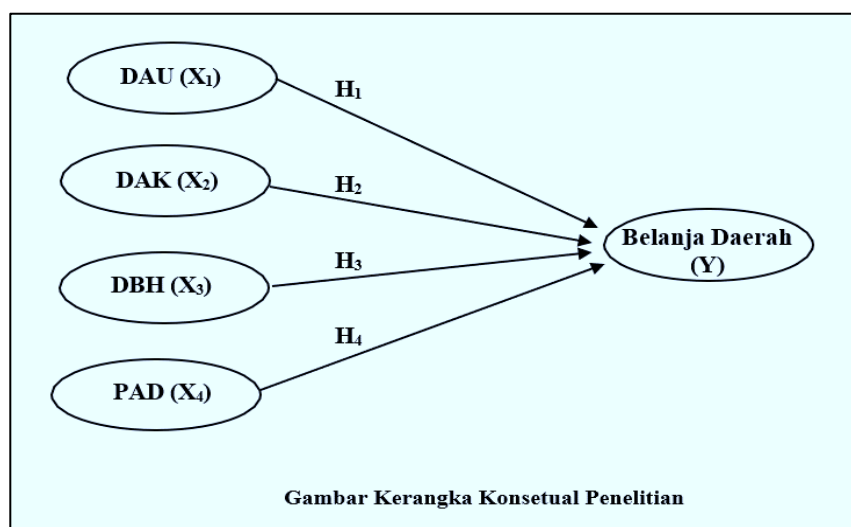
Kebijakan pemerintah pusat yang memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah dalam program otonomi daerah ini tentunya meningkatkan tanggung jawab pengelolaan program pada pemerintah daerah, program kerja yang sebelumnya ada dalam kebijakan pemerintah pusat, kini didelegasikan secara langsung kepada pemerintah daerah (Eva, 2023). Hal ini tentunya berimplikasi kepada peningkatan kebutuhan anggaran pemerintah daerah dalam membiayai program kerja yang meningkat tersebut. Maka untuk menciptakan satu sistem yang adil dan proporsional diterbitkanlah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Nomor, 33 C.E.) (Wahyudin, 2020).

Merujuk pada pengertian Dana perimbangan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 18 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Dana Perimbangan diartikan sebagai dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Wiyekti & Qibthiyyah, 2021). Selain itu Dana Perimbangan merupakan komponen pendapatan daerah yang cukup penting. Banyak pemda yang masih mengandalkan sumber pendapatan ini karena jumlah PAD yang kurang mencukupi untuk menutup anggaran belanjanya.

Peningkatan kebutuhan belanja pemerintah daerah dalam era otonomi ini memang seharusnya di atasi dengan peningkatan kinerja pemerintah daerah dalam menggali potensi pendapatan yang ada didaerahnya. Akan tetapi, kebanyakan daerah memiliki tingkat kemandirian keuangan daerah yang rendah sehingga mengandalkan dana perimbangan ini. Hal ini sejalan dengan tujuan lahirnya dana perimbangan yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, menyatakan bahwa tujuan Dana Perimbangan adalah untuk membantu daerah dalam mendanai kewenangannya, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara pusat dan daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar daerah. Dana Perimbangan menyatakan bahwa dalam

jangka panjang transfer berpengaruh terhadap belanja modal dan pengurangan jumlah transfer dapat menyebabkan penurunan dalam pengeluaran belanja modal (Nurdiwaty et al., 2017). Sedangkan jumlah belanja modal dipengaruhi oleh dana alokasi umum yang diterima dari Pemerintah Pusat. Hal ini mengindikasikan bahwa perilaku belanja daerah terutama belanja modal dipengaruhi oleh DAU dan DAK (Vera, 2024); (Ade, 2022).

Perincian pendapatan yang termasuk kedalam dana perimbangan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, yakni dana Perimbangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) itu terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Peningkatan kebutuhan belanja pemerintah daerah dalam era otonomi ini memang seharusnya di atasi dengan peningkatan kinerja pemerintah daerah dalam menggali potensi pendapatan yang ada didaerahnya. Akan tetapi, kebanyakan daerah memiliki tingkat kemandirian keuangan daerah yang rendah sehingga mengandalkan dana perimbangan ini. Belanja daerah dapat dikatakan sebagai suatu kewajiban daerah. Belanja daerah adalah semua pengeluaran kas daerah dalam periode tahun bersangkutan yang mengurangi kekayaan pemerintah daerah. Dalam struktur anggaran daerah dengan pendekatan kinerja, pengeluaran daerah dirinci menurut organisasi, fungsi, kelompok dan jenis belanja. Belanja daerah merupakan pengeluaran pemerintah dari rekening kas umum daerah sebagai pengurang kekayaan bersih atau ekuitas dana lancar pada tahun yang bersangkutan yang tidak diperoleh pembayaran kembali oleh pemerintah (Amin, 2019); (Suprانتiningrum, 2016). Belanja Daerah meliputi belanja langsung yaitu belanja yang terkait langsung dengan pelaksanaan program dan belanja tidak langsung yaitu belanja tugas pokok dan fungsi yang tidak dikaitkan dengan pelaksanaan program. Pemerintah daerah harus mengalokasikan belanja daerah secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi. Penelitian bertujuan untuk menganalisis DAU berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah; untuk menganalisis DAK berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah; untuk menganalisis DBH berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah; dan untuk menganalisis PAD berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Mamasa. Selanjutnya tujuan penelitian digambarkan dalam kerangka konseptual penelitian sebagai berikut:



Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, hipotesis dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut:

- H₁. Terdapat pengaruh signifikan DAU terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Mamasa.
- H₂. Terdapat pengaruh signifikan DAK terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Mamasa.
- H₃. Terdapat pengaruh signifikan DBH terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Mamasa
- H₄. Terdapat pengaruh signifikan PAD terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Mamasa

Manfaat dari penelitian ini membantu pemerintah daerah, khususnya Kabupaten Mamasa, dalam memahami bagaimana alokasi dana perimbangan (DAU, DAK, DBH) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mempengaruhi belanja daerah. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang hubungan antara faktor-faktor ini, pemerintah daerah dapat mengelola keuangan mereka dengan lebih efisien, memprioritaskan pengeluaran yang produktif, dan menghindari pemborosan anggaran. Melalui pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pemerintah daerah dapat mengambil langkah-langkah konkret untuk menggali potensi pendapatan lokal. Ini dapat membantu meningkatkan kemandirian keuangan daerah, mengurangi ketergantungan pada dana perimbangan dari pemerintah pusat, dan memungkinkan pemerintah daerah untuk lebih mandiri dalam merencanakan dan melaksanakan program-program pembangunan. Dengan demikian, penelitian ini memiliki potensi untuk memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan daerah, meningkatkan kualitas pembangunan lokal, mengurangi kesenjangan pembangunan, meningkatkan kemandirian keuangan daerah, dan mendukung perbaikan kebijakan yang lebih baik.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang penelitiannya dilakukan langsung untuk mendapatkan informasi dan permasalahan yang terjadi. Pendekatan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif deskriptif menggambarkan tentang pengaruh Dana Perimbangan yaitu DAU, DAK, DBH dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Mamasa tahun 2019-2023 yang akan diuji secara empiris dan menggunakan data sekunder. Penelitian ini dilaksanakan di Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Mamasa. Populasi merupakan kumpulan elemen-elemen berkaitan dengan apa yang peneliti harapkan dengan mengambil beberapa kesimpulan. Populasi yang menjadi objek penelitian ini adalah data laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Mamasa, dalam hal ini data DAU, DAK, DBH, PAD dan Belanja daerah. Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Adapun sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah data Laporan Realisasi Dana Perimbangan, PAD, Belanja Daerah tahun 2019-2023. Variabel independen sering disebut sebagai variabel bebas. Variabel bebas adalah merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (Ghozali, 2013).

Variabel independen dalam penelitian ini adalah Dana Perimbangan yaitu DAU (X₁), DAK (X₂), DBH (X₃), dan PAD (X₄). Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah. Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundangundangan yang berlaku.

Sedangkan dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Variabel bebas pada penelitian ini adalah belanja daerah (Y). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ketentuan pasal 52, belanja daerah adalah semua pengeluaran kas daerah dalam periode tahun bersangkutan yang mengurangi kekayaan pemerintah daerah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengujian Hipotesis

Beberapa hal yang termasuk ke dalam uji hipotesis ini yaitu uji t (uji parsial), uji F (uji simultan), uji regresi linier berganda dan koefisien determinasi (R^2).

1. Persamaan Regresi Linear Berganda

Tabel 3 Hasil Uji Regresi Linear Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	48265614320,383	16146387321,920		2,989	,004
DAU X ₁	-,151	,264	-,065	-,570	,571
DAK X ₂	-,003	,370	-,001	-,009	,993
DBH X ₃	16,205	5,326	,331	3,042	,004
PAD X ₄	11,035	2,076	,588	5,314	,000

Persamaan regresi dapat dilihat dari tabel koefisien di atas Koefisien dibaca sebagai nilai kolom B, untuk baris pertama mewakili konstanta (α) dan baris berikutnya mewakili konstanta variabel independen. Berikut adalah persamaan yang dihasilkan dari tabel di atas:

$$Y = 48.265.614.320,383 - 0,151X_1 - 0,003X_2 + 16,205X_3 + 11,035X_4 + \varepsilon$$

Keterangan :

Y = Belanja Daerah

a = Constanta

b1 – b3 = Koefisien masing-masing variabel

X1 = DAU

X2 = DAK

X3 = DBH

X4 = PAD

ε = veror

Hasil dari analisis persamaan regresi berganda tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

- Nilai konstanta sebesar 48.265.614.320,383 yang berarti jika variabel DAU, DAK, DBH nilainya nol, maka Belanja Daerah nilainya sebesar 48.265.614.320,383 dengan asumsi variable lain tetap (konstan).
- Koefisien regresi variabel DAU (b1) terhadap Belanja Daerah (Y) bernilai negatif dengan nilai sebesar 0,151 yang berarti jika variabel DAU (X1) mengalami penurunan sebesar 1% akan meningkatkan Belanja Daerah sebesar 0,151 dengan asumsi variable lainnya dianggap tetap atau sama dengan nol.
- Koefisien regresi variabel DAK (b2) terhadap Belanja Daerah (Y) bernilai negatif dengan nilai sebesar 0,003 yang berarti jika variabel DAK (X2) mengalami penurunan sebesar 1% akan meningkatkan Belanja Daerah sebesar 0,003 dengan asumsi variable lainnya dianggap tetap atau sama dengan nol.
- Koefisien regresi variabel DBH (b3) terhadap Belanja Daerah (Y) bernilai positif dengan nilai sebesar 16,205 yang berarti jika variable DBH (X3) mengalami kenaikan 1% maka akan meningkatkan Belanja Daerah sebesar 16,205 dengan asumsi variable lainnya dianggap tetap atau sama dengan nol.
- Koefisien regresi variabel PAD (b4) terhadap Belanja Daerah (Y) bernilai positif dengan nilai sebesar 11,035 yang berarti jika variabel PAD (X4) mengalami kenaikan 1% maka akan meningkatkan Belanja Daerah sebesar 11,035 dengan asumsi variable lainnya dianggap tetap atau sama dengan nol.

Hasil Uji F (Uji Simultan)

Uji F dilakukan dengan membandingkan nilai fhitung dengan nilai ftabel. Untuk degree of freedom (df1) = k-1 dan degree of freedom (df2) = n-k, dalam hal ini (n) merupakan jumlah sampel dan (k) merupakan jumlah variabel independent dan dependent dalam penelitian. Pada penelitian ini jumlah sampel (n) = 60, makabesarnya df1 dapat dihitung $5-1 = 4$ dan df2 $60-5 = 55$, dengan df1=4, df2= 55 dan alpha= 0,05 didapat f tabel = 2,540. Adapun hasil uji F dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel Anova di bawah ini.

Tabel 4. Hasil Uji F (Uji Simultan)
ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	7320031288507	4	1830007822126	14,016	,000 ^b
	4840000000,00		8710000000,00		
	0		0		
Residual	7181206623898	55	1305673931617		
	2020000000,00		854800000,000		
	0				
Total	1450123791240	59			
	56860000000,0				
	00				

a. Dependent Variable: Belanja Daerah

b. Predictors: (Constant), PAD, DBH, DAK, DAU

Tabel 4 di atas menunjukkan bahwa nilai Fhitung yang diolah dengan menggunakan SPSS adalah sebesar 14.016. Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa nilai Fhitung = 14.016 > dari Ftabel = 2,540. Ini berarti bahwa variable independent yang terdiri dari DAU, DAK, DBH, dan PAD berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen yaitu Belanja Daerah Kabupaten Mamasa.

Hasil Uji Hasil Uji t (Uji Parsial)

Uji t dilakukan dengan membandingkan nilai thitung dengan ttabel, untuk degree of freedom (df) = $n - 5$, dalam hal ini (n) merupakan jumlah sampel dan (k) merupakan jumlah variabel independent dalam penelitian dan 1 adalah jumlah variabel dependent. Pada penelitian ini jumlah sampel (n) = 60, maka besarnya df dapat dihitung $60 - 5 = 55$, dengan df = 55 dan alpha 0,05 maka didapat ttabel = 1.673. Hasil Uji t penelitian ini dapat dilihat pada Tabel Coefficients di bawah ini yaitu dengan melihat nilai t maupun sig.-nya.

**Tabel 5. Hasil Uji t (Uji Parsial)
Coefficients^a**

		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	48265614320,383	16146387321,920		2,989	,004
	DAU X ₁	-,151	,264	-,065	-,570	,571
	DAK X ₂	-,003	,370	-,001	-,009	,993
	DBH X ₃	16,205	5,326	,331	3,042	,004
	PAD X ₄	11,035	2,076	,588	5,314	,000

a. Dependent Variable: Belanja Daerah Y

Untuk menentukan H₀ maupun H_a yang ditolak atau diterima maka nilai thitung di atas dapat dibandingkan dengan nilai ttabel pada tingkat signifikansi 5% (alpha = 0,05). Nilai ttabel pada tingkat signifikansi 5% (alpha = 0,05) adalah 1.673. Dengan membandingkan thitung dan ttabel maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

a. Variabel DAU (X₁)

Secara parsial dengan nilai signifikansi 0,571 > 0,05 maka H₀ diterima dan H_a ditolak, berarti secara parsial DAU tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah.

b. Variabel DAK (X₂)

Secara parsial dengan nilai signifikansi 0,993 > 0,05 maka H₀ diterima dan H_a ditolak, berarti secara parsial DAK tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja daerah.

c. Variabel DBH (X₃)

Secara Parsial dengan nilai signifikansi 0,004 < 0,05. Maka H₀ ditolak dan H_a diterima, berarti secara parsial DBH berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Daerah.

d. Variabel PAD (X₄)

Secara parsial dengan nilai signifikansi 0,000 < 0,05 maka H₀ ditolak dan H_a di terima, berarti secara parsial PAD berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah.

Koefisien Determinasi (R²)

**Tabel 6 Koefisien Determinasi
Model Summary^b**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,710 ^a	,505	,469	36134110361,5	1,933
					11

a. Predictors: (Constant), PAD, DBH, DAK, DAU

b. Dependent Variable: Belanja Daerah

Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai R Square adalah 0,505 atau 50,5 %. Ini berarti bahwa variabel independen berupa DAU, DAK, DBH, PAD secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen yaitu Belanja Daerah sebesar 50,5 % sedangkan sisanya sebesar 49,5 % dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak diuji dalam penelitian ini.

1. Pengaruh DAU (X1) Terhadap Belanja Daerah (Y)

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dengan uji t menunjukkan bahwa variabel DAU tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah dengan nilai koefisien regresi (t) 0,570 dengan tingkat signifikansi 0,571.

2. Pengaruh DAK (X2) terhadap Belanja Daerah (Y)

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dengan uji t menunjukkan bahwa variabel DAK tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah dengan nilai koefisien regresi 0,009 dengan tingkat signifikansi 0,993.

3. Pengaruh DBH (X3) terhadap Belanja Daerah (Y)

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dengan uji t menunjukkan bahwa variabel DBH berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah dengan nilai koefisien regresi 3,042 dengan tingkat signifikansi 0,004.

4. Pengaruh PAD (X4) Terhadap Belanja Daerah (Y)

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dengan uji t menunjukkan bahwa variabel PAD berpengaruh terhadap belanja daerah dengan nilai koefisien regresi (t) 5.314 dengan tingkat signifikansi 0,000.

KESIMPULAN

Variabel DAU terhadap belanja daerah menunjukkan bahwa DAU tidak berpengaruh secara signifikan terhadap belanja daerah sehingga penurunan pada DAU akan berdampak pada meningkatnya hasil belanja daerah Kabupaten Mamasa. Variabel DAK terhadap belanja daerah menunjukkan bahwa DAK tidak berpengaruh terhadap belanja daerah. Hal ini menunjukkan bahwa penurunan pada DAK akan berdampak pada meningkatnya hasil belanja daerah Kabupaten Mamasa. Variabel DBH terhadap belanja daerah menunjukkan bahwa DBH berpengaruh terhadap belanja daerah. Hal ini menunjukkan semakin tinggi dana bagi hasil akan berdampak pada meningkatnya hasil belanja daerah Kabupaten Mamasa. Variabel PAD terhadap belanja daerah menunjukkan bahwa PAD berpengaruh terhadap belanja daerah. Hal ini menunjukkan semakin tinggi PAD akan berdampak pada meningkatnya hasil belanja daerah Kabupaten Mamasa. Hasil Pengujian secara simultan (uji F) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan (bersama-sama) antara variabel DAU, DAK, DBH, dan PAD terhadap belanja daerah (Y), yang ditunjukkan pada nilai signifikansi 0.000. Nilai R Square adalah 0,505

atau 50,5%, berarti bahwa variabel independen berupa DAU, DAK, DBH dan PAD secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen yaitu belanja daerah sebesar 50,5% sedangkan sisanya sebesar 49,5% dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

BIBLIOGRAPHY

- Ade, K. J. (2022). Determinan Penerapan Konservatisme Akuntansi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Determinan Penerapan Konservatisme Akuntansi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia*.
- Aji, B. P., Kirya, I. K., & Susila, G. P. A. J. (2018). Analisis sumber pendapatan asli daerah (PAD) dalam pelaksanaan otonomi daerah di kabupaten buleleng. *Bisma: Jurnal Manajemen*, 4(2), 95–104.
- Amin, F. (2019). *Penganggaran di pemerintah daerah*. Universitas Brawijaya Press.
- Eva, H. (2023). Pengaruh Pad, Dana Perimbangan, Dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Ngawi Tahun 2006-2021. *Journal of Development Economic and Social Studies*, 2(4).
- Hendriko, D. P. (2021). Analisa Dan Klasifikasi Kemampuan Keuangan Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Dalam Era Otonomi Daerah. *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi, Bisnis & Akuntansi*, 1, 211–218.
- Lambe, K. H. P., & Tandi, A. (2021). Analisis Alokasi Kredit Usaha Rakyat Terhadap Kinerja Keuangan Pada Bank Rakyat Indonesia. *Jurnal Investasi*, 7(4), 103–113. <https://doi.org/10.31943/investasi.v7i4.164>
- Monica, F., & Sa'roni, C. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010-2019). *JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan*, 5(2), 819–833.
- Nomor, U.-U. (33 C.E.). *Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah pusat dan Pemerintah daerah*.
- Nurdiwaty, D., Zaman, B., & Kristinawati, E. (2017). Analisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah terhadap belanja modal di kabupaten/kota Jawa Timur. *Jurnal Aplikasi Bisnis*, 43–59.
- Rokhman, H. (2023). The Importance Of Community Welfare In Economic Growth Through Government Spending. *International Journal of Accounting & Finance in Asia Pasific (IJAFAP)*, 6(3), 50–66.
- Sulistyo, A. T. (2018). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 3(1), 43–59.
- Suprantiningrum, S. R. (2016). Analisis kinerja pengelolaan keuangan daerah dan tingkat kemandirian daerah di era otonomi daerah (Studi Kasus Kota Semarang Tahun 2009-2013). *Media Ekonomi Dan Manajemen*, 30(1).
- Vera, Y. C. (2024). *Pengaruh Pajak Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Menurut Ekonomi Islam Di Kota Bandar Lampung Tahun 2013-2022*. Uin Raden Intan Lampung.
- Wahyudin, I. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Barat. *Indonesian Accounting Research Journal*, 1(1), 86–97.

- Wasistiono, S., & Polyando, P. (2017). *Politik Desentralisasi Di Indonesia Edisi Revisi Yang Diperluas*. IPDN PRESS.
- Winarni, E., Ahmad, A. A., & Suharno, S. (2020). Pengaruh Investasi dan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 20(2), 447–450.
- Wiyekti, N., & Qibthiyyah, R. M. (2021). Pengaruh Intergovernmental Fiscal Transfers (IFT) Terhadap Hutan Konservasi di Indonesia. *Jurnal Manajemen Keuangan Publik*, 5(1), 29–53.
- Yuliantoni, S., & Arza, F. I. (2021). Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Belanja Modal dengan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebagai Variabel Pemoderasi pada Pemerintah Provinsi se-Indonesia Periode 2015-2019. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 3(1), 170–187.



© 2024 by the authors. Submitted for possible open-access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).